

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp5,9 T (379,2%)
▲ 34,2% (yoy)

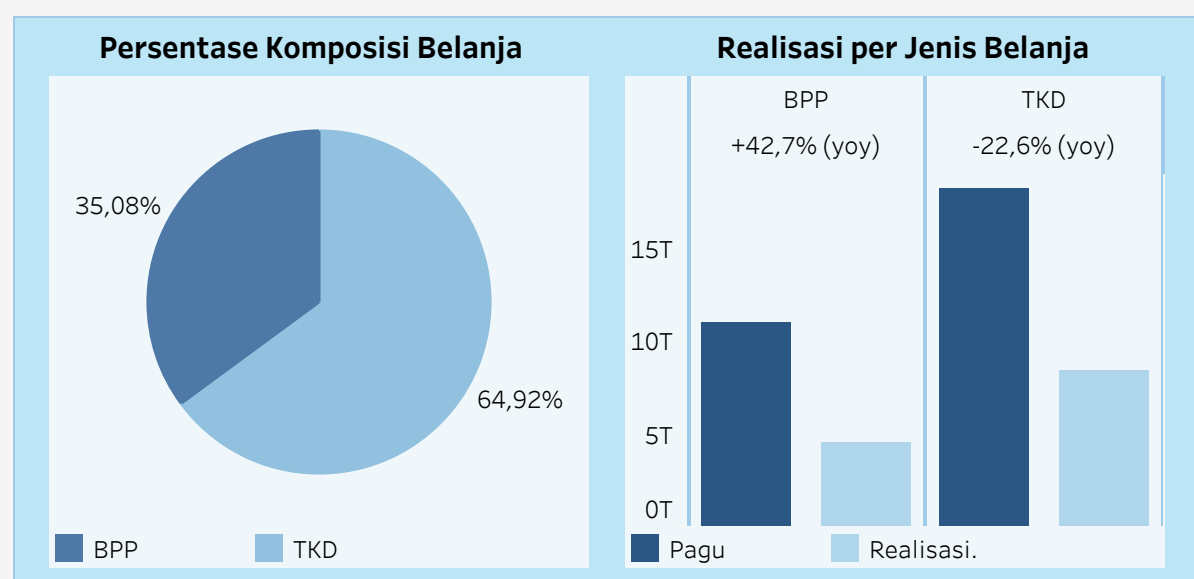
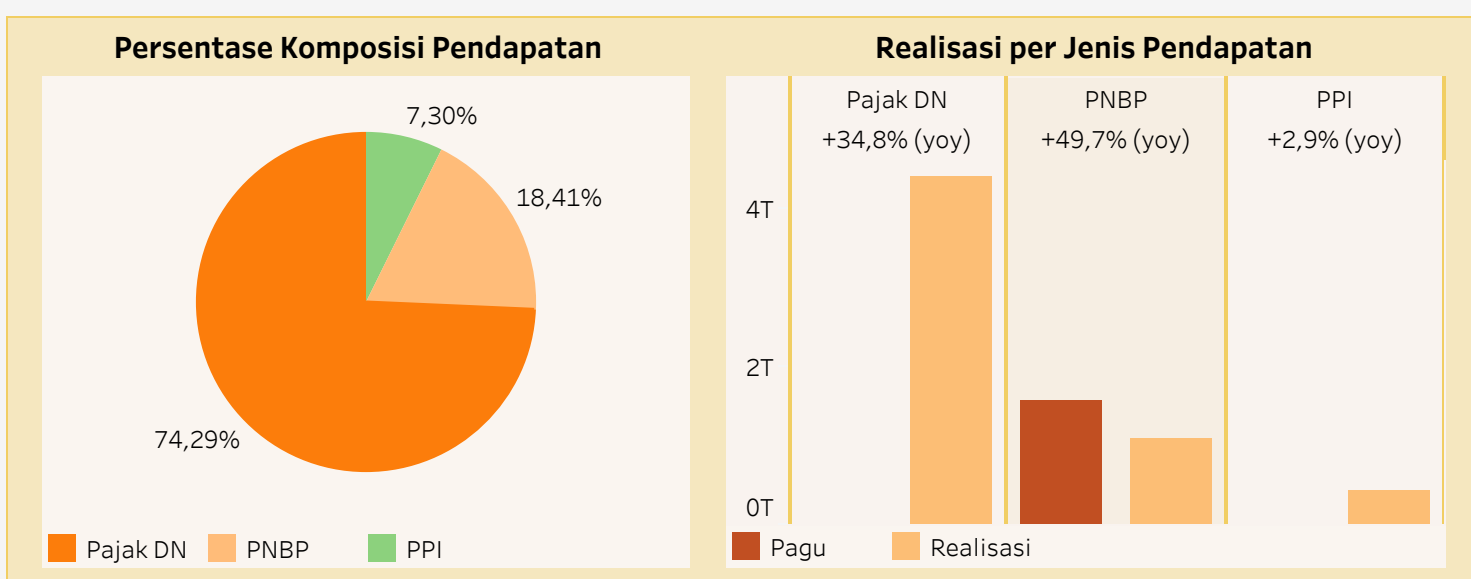
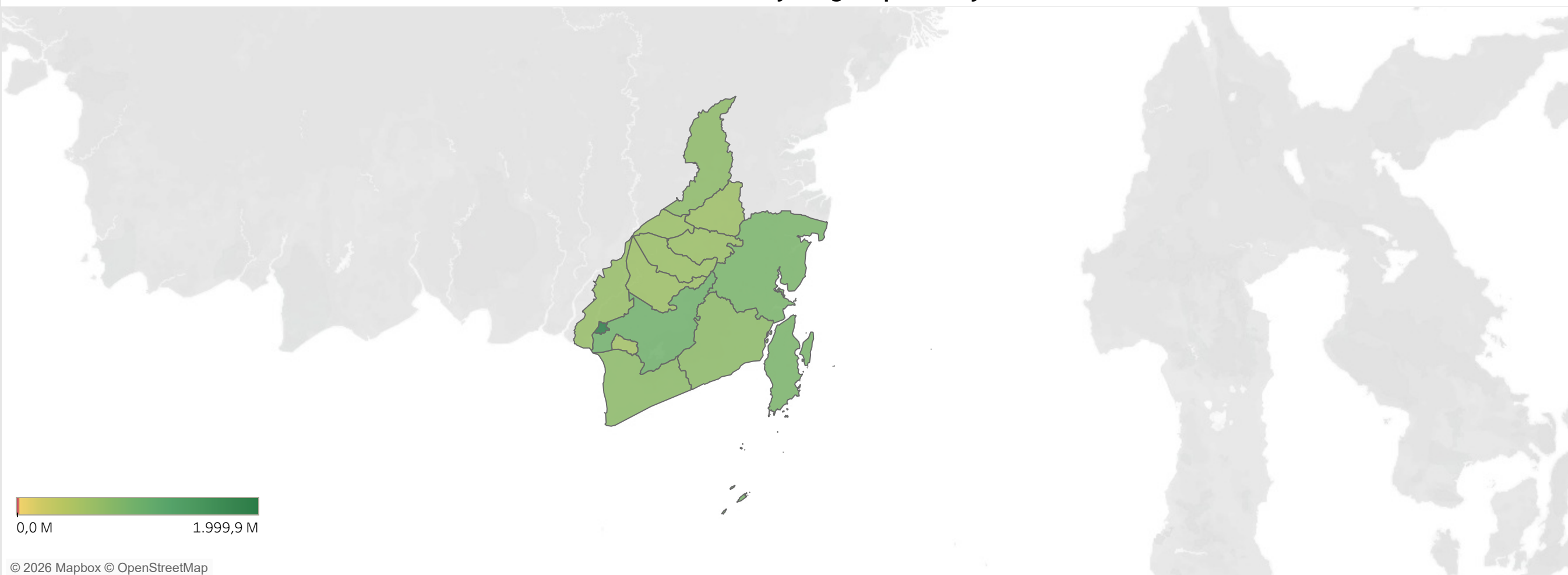
Belanja

Rp13,0 T (44,5%)
▼ -7,8% (yoy)

Defisit

Rp-7,0 T (25,5%)
▼ 27,0% (yoy)

Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah

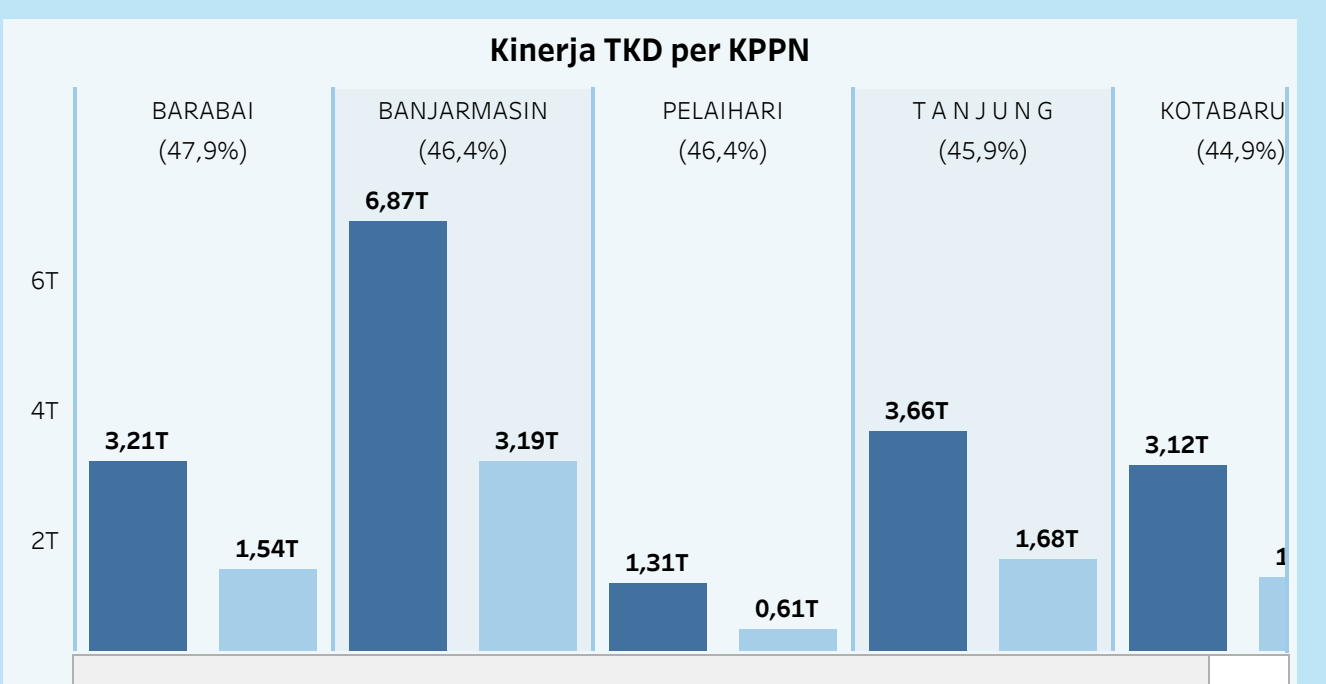
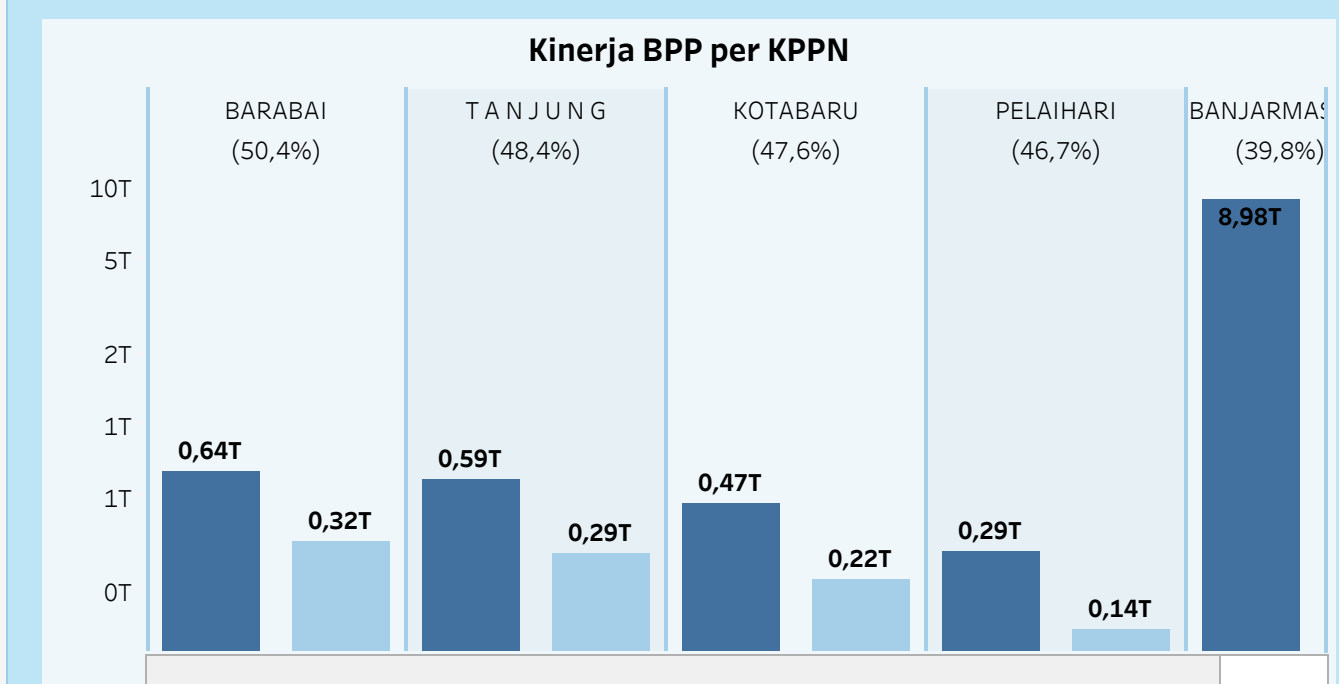
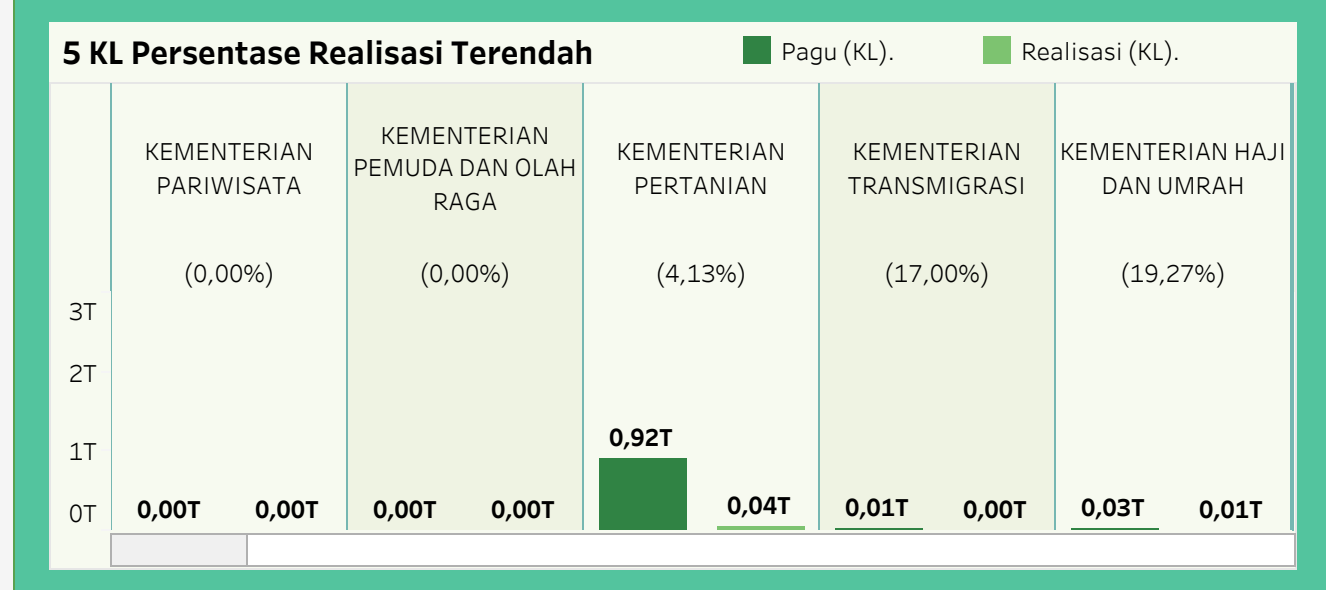
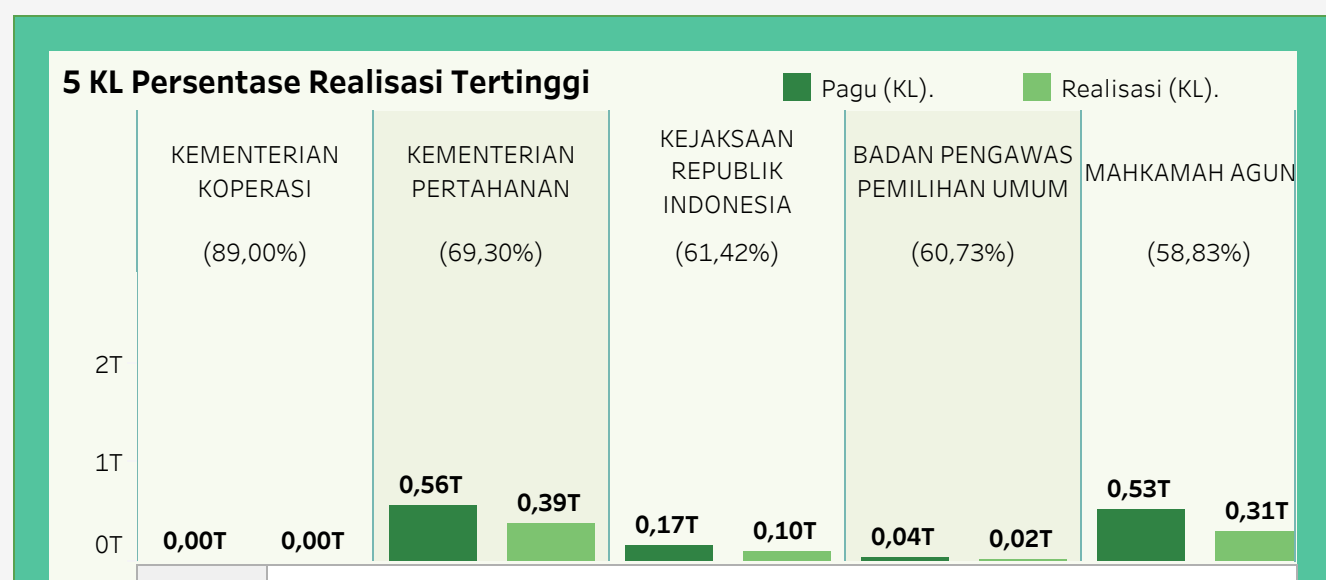
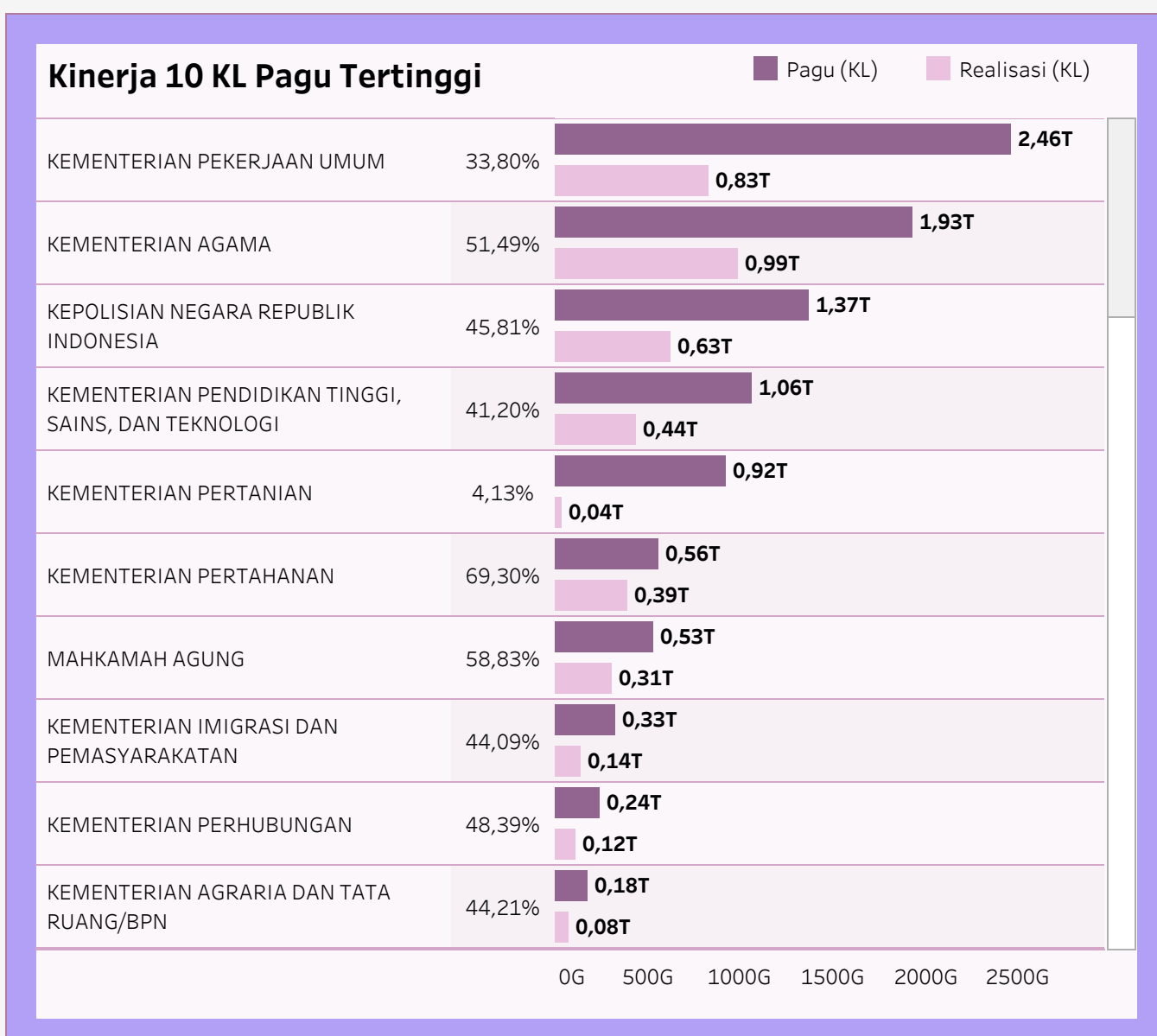


Pendapatan Regional

Wilayah	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	4,4T	5,9 T	▲ 34,25%
Grand Total	4,4T	5,9 T	▲ 34,25%

Belanja Regional

Wilayah	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,8T	14,1T	33,6%	29,2T	13,0 T	44,5%	▼ 7,81%
Grand Total	41,8T	14,1T	33,6%	29,2T	13,0 T	44,5%	▼ 7,81%



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d. 12 Juni 2026

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp5,92 triliun (20,13%) dari target pendapatan negara sebesar Rp29,43 triliun. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 34,25% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 25,65% (Rp4,40 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 4,03% (Rp432,17 miliar), serta PNBPN mencapai 69,90% (Rp1,09 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (74,29%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d. 12 Juni 2026

1. Kinerja Belanja Negara sebesar Rp12,96 triliun (44,47%) dari pagu Rp29,15 triliun, terkontraksi 7,81% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 41,43% (Rp4,55 triliun) dari pagu Rp10,98 triliun, tumbuh 42,70% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 46,31% (Rp8,42 triliun) dari pagu Rp18,17 triliun, terkontraksi 22,62% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (64,92%).

2. Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi, Kementerian PU merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,46 triliun, dengan realisasi mencapai 33,80% (Rp0,83 triliun). Kementerian Pertahanan menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 69,30% (Rp0,39 triliun) dari pagu Rp0,56 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 4,13% (Rp0,04 triliun) dari pagu Rp0,92 triliun.

3. Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Koperasi dengan realisasi 89,00% (Rp3,79 miliar) dari pagu Rp4,25 miliar. Sementara, terdapat 2 K/L yang belum merealisasikan anggaran belanja s.d. 12 Juni 2026 yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4. Kinerja KPPN, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 48,3% (Rp1,86 triliun) dari pagu Rp3,84 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 42,7% (Rp6,77 triliun) dari pagu Rp15,86 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dengan tujuan utama memastikan fasilitas pajak UMKM 0,5% tepat sasaran. Hal ini juga sebagai upaya pemerintah mencari titik keseimbangan antara memberikan kemudahan kepada UMKM, mencegah penyalahgunaan fasilitas

pajak, dan kebijakan perpajakan harus mendukung praktik bisnis yang sehat dan berintegritas.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Implementasi PP Nomor 20 Tahun 2026 agar disertai penguatan mekanisme pengawasan berbasis risiko, peningkatan integrasi data perpajakan dan perizinan usaha, serta penyusunan kriteria yang jelas dan terukur untuk penerima fasilitas pajak UMKM tarif 0,5%, sehingga manfaat insentif benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang berhak. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi dan pendampingan kepatuhan perpajakan bagi UMKM, menyederhanakan prosedur administrasi, serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan guna memastikan keseimbangan antara pemberian kemudahan berusaha, peningkatan kepatuhan pajak, dan pencegahan penyalahgunaan fasilitas.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Terdapat keterlambatan penyaluran Tunjangan Kinerja satker di lingkup Kementerian Pertahanan selama 4 bulan karena kekurangan pagu. Selain itu proses penyelesaian pagu minus dengan menggunakan Revisi POK terhambat dengan proses Revisi DJA yang berlangsung selama 2 bulan.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Satuan kerja agar segera mengidentifikasi dan menyampaikan kebutuhan riil pagu belanja pegawai beserta proyeksi kekurangannya kepada unit Eselon I. Selanjutnya, Eselon I melakukan konsolidasi kebutuhan anggaran seluruh satker dan mengajukan revisi anggaran secara terkoordinasi kepada Kementerian Keuangan, serta melakukan percepatan proses revisi internal agar tidak terjadi penundaan.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pemantauan Program Prioritas
Minggu ke-22



HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Jumlah SPPG sebanyak 301 SPPG, jumlah supplier sebanyak 1.346 supplier, dan penerima manfaat sebanyak 704.761 penerima.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Ketersediaan bahan baku pangan di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih mengalami fluktuasi, terutama pada komoditas sayuran, buah-buahan, dan susu. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor musim, keterbatasan pasokan lokal, serta distribusi yang belum merata, sehingga berdampak pada keterbatasan variasi menu yang dapat disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

Untuk menjaga keberagaman dan kualitas menu MBG, perlu dilakukan penguatan kemitraan dengan petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha pangan lokal melalui skema kontrak pasokan yang berkelanjutan, serta penyusunan menu alternatif berbasis bahan pangan lokal yang tetap memenuhi standar gizi. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarwilayah dan optimalisasi rantai distribusi guna memastikan ketersediaan bahan baku secara lebih stabil sepanjang tahun.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pemantauan Program Prioritas
Minggu ke-22



HASIL ANALISIS FLPP

Analisis FLPP

Jumlah unit yang dibangun meningkat dari 3.500 menjadi 3.861 unit, realisasi FLPP meningkat dari 2.706 unit menjadi 3.158 unit, jumlah lokasi realisasi FLPP meningkat dari 433 lokasi menjadi 459 lokasi, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan jumlah nominal FLPP meningkat semula sebesar Rp355.736.645.250,- menjadi Rp415.088.411.883,-.

Isu dan Rekomendasi FLPP

A | Isu FLPP, meliputi:

Pelemahan nilai tukar rupiah mendorong kenaikan harga bahan bangunan sehingga meningkatkan biaya pembangunan rumah subsidi di Kalimantan Selatan. Sementara itu, harga jual rumah subsidi dibatasi oleh pemerintah sehingga tidak dapat menyesuaikan kenaikan biaya secara cepat. Kondisi ini menekan margin keuntungan developer, menyebabkan sebagian pengembang menunda atau mengurangi pembangunan rumah subsidi, yang pada akhirnya berpotensi menghambat pencapaian target Program Rumah Rakyat.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian batas harga jual rumah subsidi secara berkala sesuai perkembangan biaya konstruksi, memberikan insentif atau stimulus kepada pengembang, serta mendorong penggunaan material lokal yang lebih kompetitif. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan perbankan dan pelaku usaha perumahan guna menjaga kelayakan usaha pengembang sekaligus memastikan ketersediaan pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pemantauan Program Prioritas
Minggu ke-22



HASIL ANALISIS GIANT SEA WALL

Analisis Giant Sea Wall

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

Isu dan Rekomendasi Giant Sea Wall

A | Isu *Giant Sea Wall*, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

B | Rekomendasi *Giant Sea Wall*, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

HASIL ANALISIS KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Analisis Koperasi Desa Merah Putih

Jumlah Koperasi sebanyak 2013

Koperasi telah memiliki akun sebanyak 2013

Koperasi telah memiliki NIB tetap 1.648

Koperasi telah memiliki NPWP sebanyak 2013

Koperasi telah RAT 2025 meningkat dari 1.639 menjadi 1.650

Simpanan pokok meningkat dari Rp1.714.491.110,- menjadi Rp1.714.746.110,-

Simpanan wajib meningkat dari Rp305.689.000,- menjadi Rp309.839.000,-

Volume transaksi tahun 2026 meningkat dari 6.648 menjadi 7.376

Nilai transaksi tahun 2026 meningkat dari Rp97.410.500,- menjadi Rp116.828.600,-

Isu dan Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih

A | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Barito Kuala telah terbentuk secara kelembagaan dan sebagian telah mulai menjalankan aktivitas usaha, namun masih terdapat tantangan berupa belum tersedianya gerai fisik di sebagian besar desa serta belum meratanya kesiapan operasional koperasi.

B | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Perlu dilakukan percepatan pembangunan dan pemanfaatan gerai fisik secara bertahap di desa-desa yang belum memiliki sarana pendukung, disertai penguatan kapasitas pengelola koperasi melalui pendampingan usaha, peningkatan kompetensi manajerial, serta percepatan pemenuhan legalitas dan perizinan usaha.

HASIL ANALISIS SEKOLAH RAKYAT

Analisis Sekolah Rakyat

Target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR

Realisasi jumlah SR sd Saat ini yang sudah berjalan per jenjang sebanyak 13 Unit :

1. PAUD = 0 Unit
2. SD = 2 Unit
3. SMP = 6
4. SMA = 5

Isu dan Rekomendasi Sekolah Rakyat

A | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Masih terdapat keterbatasan pemahaman dan informasi masyarakat mengenai tujuan, mekanisme pendaftaran, persyaratan peserta didik, serta manfaat Program Sekolah Rakyat. Penyebaran informasi yang belum merata, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah dengan akses informasi yang terbatas, berpotensi menyebabkan kelompok sasaran yang seharusnya memperoleh manfaat program tidak terjangkau secara optimal.

B | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat dengan melibatkan camat, kepala desa, dan lurah agar informasi mengenai Sekolah Rakyat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi juga perlu didukung melalui berbagai media komunikasi, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan forum-forum masyarakat di tingkat desa dan kelurahan guna memastikan calon peserta didik dari keluarga sasaran memperoleh informasi yang lengkap dan tepat waktu.

HASIL ANALISIS REVITALISASI SEKOLAH

Analisis Revitalisasi Sekolah

Target pelaksanaan Revitalisasi Sekolah TA 2026 sebanyak 39 Sekolah/Madrasah, yang sedang berjalan oleh Satker Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 29 Madrasah, dan sudah PKS melalui Ditjen PDM 10 sekolah.

Isu dan Rekomendasi Revitalisasi Sekolah

A | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Terdapat kendala terkait ketersediaan material konstruksi dan tenaga kerja pada beberapa wilayah, yang dapat memengaruhi penyelesaian rehabilitasi ruang belajar, sarana sanitasi, dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya sesuai target yang telah ditetapkan.

B | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Perlu memperkuat perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan melalui optimalisasi pengadaan material, pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara lebih akurat, serta penyiapan alternatif pemasok dan sumber daya untuk mengantisipasi potensi keterlambatan. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pekerjaan, khususnya pada lokasi yang menghadapi keterbatasan material dan tenaga kerja.

HASIL ANALISIS SMA UNGGUL GARUDA

Analisis SMA Unggul Garuda

Target Jumlah Sekolah Garuda

1. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1
2. Sekolah Garuda Baru masih belum adaupdate

Realisasi Jumlah Sekolah Garuda sd saat yang sudah berjalan (unit)

1. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1 (SMAN Banua Kalsel)
2. Sekolah Garuda Baru masih belum adaupdate

Isu dan Rekomendasi SMA Unggul Garuda

A | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027 pada Program Sekolah Unggul Garuda di Kalimantan Selatan menjadi perhatian karena tingginya antusiasme pelajar berprestasi untuk masuk ke SMAN Banua Kalsel sebagai sekolah transformasi unggulan berbasis asrama dan penguatan sains-teknologi.

B | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Diperlukan sistem seleksi yang transparan, objektif, dan inklusif agar dapat menjangkau siswa terbaik dari seluruh wilayah Kalimantan Selatan, termasuk daerah terpencil dan keluarga kurang mampu. pemerintah juga perlu mengantisipasi berbagai tantangan seperti keterbatasan daya tampung, pemerataan akses pendidikan unggul, peningkatan kualitas fasilitas asrama, serta penguatan kompetensi dan kesiapan tenaga pendidik.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pemantauan Program Prioritas
Minggu ke-22



HASIL ANALISIS KETAHANAN PANGAN

Analisis Ketahanan Pangan

Produksi Gabah Tahun 2026 sampai dengan saat ini mencapai 409.915,77 Ton. Alokasi dana program ketahanan pangan sebesar Rp867,14 miliar dan sudah terealisasi sebesar Rp15,36 miliar (1,77%).

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Pangan

A | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun Baru Islam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Meskipun langkah ini berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, tingginya permintaan pangan menjelang HBKN tetap berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan pasokan dan memicu kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis.

B | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Perlu dilakukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, distributor, produsen, dan pelaku usaha pangan guna menjamin kecukupan pasokan komoditas strategis. Kegiatan pemantauan harga dan stok secara intensif, perluasan titik pelaksanaan GPM pada wilayah dengan potensi gejolak harga tinggi, serta optimalisasi distribusi pangan antarwilayah juga perlu terus dilakukan agar stabilitas harga tetap terjaga, inflasi pangan terkendali, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

HASIL ANALISIS KETAHANAN ENERGI

Analisis Ketahanan Energi

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Energi

A | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus mendorong penguatan ketahanan energi melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan menginstruksikan para sekretaris kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi program di tingkat wilayah.

B | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Perlunya sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga masyarakat dalam mengembangkan potensi energi terbarukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).